



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024 *AUDITED*

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024



KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA
JALAN DR. KUSUMA ATMAJA NO.1 GKN I LANTAI 3 DENPASAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Denpasar, 8 Mei 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Sudarsono
NIP 196912141996031002



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	43
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	50
F. Pengungkapan Penting Lainnya	53
VI. Lampiran dan Daftar	55



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA I DENPASAR
JL.DR. KUSUMAATMAJA, RENON DENPASAR 80235
TELEPON (0361)226703,235434, FAXIMILE (0361) 238217

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Denpasar, 8 Mei 2025
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik
Sudarsono
NIP 196912141996031002



Laporan Keuangan Tahun 2024 *Audited* Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp711.569.714 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp711.569.714,- atau mencapai 388 persen dari estimasi dari pendapatan LRA sebesar Rp183.232.000,-.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.550.786.277,- atau mencapai 95 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.752.698.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 1.958.764.165,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 99.189.232,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.859.574.933,- ; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban Jangka Pendek Rp1.575.471,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.575.471,- dan Rp 1.957.188.694,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 574.678.600,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan Operasional adalah sebesar Rp 2.954.939.519,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (2.380.260.919,-). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 162.218.000,- dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (2.218.042.919,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp1.309.983.800,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(2.218.042.919,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.865.247.813,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp 1.957.188.694,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I.LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		183.232.000	711.569.714	388,34	102.856.802
JUMLAH PENDAPATAN		183.232.000	711.569.714	388,34	102.856.802
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	2.687.236.000	2.485.610.037	92,50	1.970.525.375
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-		-
Jumlah Belanja Operasi		2.687.236.000	2.485.610.037		1.970.525.375
Belanja Modal	B.6				
Belanja Tanah	B.6.1	-	-	0,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.6.2	1.065.462.000	1.065.176.240	99,97	988.868.000
Belanja Gedung dan Bangunan	B.6.3	-	-	0,00	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.6.4	-	-	0,00	-
Belanja Modal Lainnya	B.6.5	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Modal		1.065.462.000	1.065.176.240	99,97	988.868.000
JUMLAH BELANJA		3.752.698.000	3.550.786.277	94,62	2.959.393.375

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024	TA 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.3	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.4	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.5	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.6	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.7	47.304.500	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.8	25.326.886	-
Persediaan	C.9	26.557.846	37.494.009
Jumlah Aset Lancar		99.189.232	37.494.009
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.13	-	-
Peralatan dan Mesin	C.14	6.851.306.120	6.037.357.110
Gedung dan Bangunan	C.15	-	-
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.16	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.17	27.285.490	27.285.490
Konstruksi dalam pengerjaan	C.18	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(5.019.016.677)	(4.791.067.396)
Jumlah Aset Tetap		1.859.574.933	1.273.575.204
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.20	-	-
Aset Lain-Lain	C.21	285.497.230	339.620.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(285.497.230)	(339.620.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		1.958.764.165	1.311.069.213
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Muka dari KPPN	C.23	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	1.575.471	1.085.413
Utang yang Belum Ditagihkan	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.575.471	1.085.413
JUMLAH KEWAJIBAN		1.575.471	1.085.413
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar		-	-
Ekuitas Dana Investasi		-	-
Ekuitas	C.28	1.957.188.694	1.309.983.800
JUMLAH EKUITAS DANA		1.957.188.694	1.309.983.800
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.958.764.165	1.311.069.213

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024	TA 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Penerimaan Negara Bukan Pajak		574.678.600	88.106.802
JUMLAH PENDAPATAN		574.678.600	88.106.802
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	89.321.231	55.745.100
Beban Barang dan Jasa	D.4	976.608.403	954.300.496
Beban Pemeliharaan	D.5	351.783.069	306.503.742
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.032.019.055	658.792.075
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	505.207.761	361.916.524
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		2.954.939.519	2.337.257.937
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.380.260.919)	(2.249.151.135)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		162.218.000	14.750.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	456.501.454
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		162.218.000	(441.751.454)
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		162.218.000	(441.751.454)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(2.218.042.919)	(2.690.902.589)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(2.218.042.919)	(2.690.902.589)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024	TA 2023
EKUITAS AWAL	E.1	1.309.983.800	861.912.299
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2.218.042.919)	(2.690.902.589)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS			-
Penyesuaian Nilai Aset	E.3	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.5	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.6	-	-
Koreksi Lain-lain	E.7	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		2.865.247.813	3.138.974.090
EKUITAS AKHIR	E.8	1.957.188.694	1.309.983.800
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		647.204.894	448.071.501

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Entitas berkedudukan di Jalan DR. Kusumaatmaja, Gedung Keuangan Negara I Lantai 3 Renon Denpasar.

Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara berkomitmen dengan visi **“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.

- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis

akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

A.5. Kebijakan Akuntansi

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 *Audited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Disamping itu, dalam

penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara adalah sebagai berikut:

*Pendapatan
-LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
-LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Keuangan RI adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan

tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%

Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,

dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	183.232.000	183.232.000
Jumlah Pendapatan	183.232.000	183.232.000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	2.243.118.000	2.687.238.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Belanja Modal	1.065.462.000	1.065.462.000
Jumlah Belanja	3.308.580.000	3.752.700.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp711.569.714*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp711.569.714 atau mencapai 50,79 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp102.856.802. Pendapatan Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta pendapatan dari Penjualan dan Pendapatan Jasa. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	162.218.000	#DIV/0!
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	6.000	#DIV/0!
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	0%
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	183.232.000	549.345.714	299,81%
Jumlah	183.232.000	711.569.714	388,34

Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan berasal dari pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan. Sedangkan Pendapatan Jasa berasal dari pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II.

Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 591,81 persen dibanding tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya penurunan Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pemindahtanganan BMN serta Pendapatan dari Penjualan	162.218.000	14.750.000	999,78
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	549.345.714	88.106.802	523,50
Pendapatan Lain-lain	6.000	-	-
Jumlah	711.569.714	102.856.802	591,81%

*Realisasi
Belanja Negara
Rp3.550.786.277*

B.2 Belanja

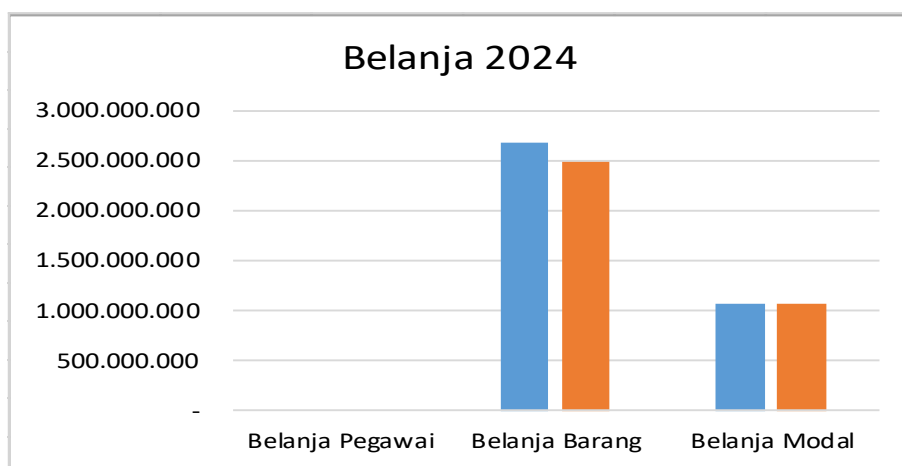
Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.550.786.277 atau 86,04 persen dari anggaran belanja sebesar Rp2.959.393.375. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024

Uraian	TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2.687.236.000	2.489.810.037	92,65
Belanja Modal	1.065.462.000	1.065.176.240	-
Total Belanja Kotor	3.752.698.000	3.554.986.277	94,73
Pengembalian		4.200.000	-
Jumlah	3.752.698.000	3.550.786.277	94,62

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

(dalam Juta Rupiah)



Dibandingkan dengan 31 Desember 2023, Realisasi Belanja 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 19,98 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya realisasi belanja modal pada Tahun 2024 dari sebelumnya tidak ada realisasi belanja modal Tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024
dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2.485.610.037	1.970.525.375	26,14
Belanja Modal	1.065.176.240	988.868.000	7,72
Jumlah	3.550.786.277	2.959.393.375	19,98

*Belanja
Pegawai
Rp0*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja per 30 September 2024 mengalami penurunan sebesar 100 persen dari 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan sentralisasi pada pembayaran gaji yaitu dibayarkan melalui Kantor Pusat.

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2024
Dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

*Belanja
Barang Rp
2.485.610.037*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 2.485.610.037 dan Rp1.970.525.375. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 26,21 persen dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023.

Hal ini antara lain disebabkan oleh melandainya kasus pandemic Covid-19 dan adanya kebijakan pemerintah terkait Pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sehingga dapat mempengaruhi belanja barang terutama belanja perjalanan dinas selama Tahun 2024.

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	495.542.688	522.680.952	(5,19)
Belanja Barang Non Operasional	366.375.800	407.529.900	(10,10)
Belanja Persediaan	78.385.068	52.014.475	50,70
Belanja Jasa	161.504.357	23.004.231	602,06
Belanja Pemeliharaan	351.783.069	306.503.742	14,77
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.036.219.055	658.792.075	57,29
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2.489.810.037	1.970.525.375	26,35
Pengembalian Belanja	(4.200.000)	(1.165.504)	100,00
Jumlah Belanja	2.485.610.037	1.969.359.871	26,21

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp0*

B.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	NAIK (TURUN) %
-	0	0	0,00
-	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

*Belanja Modal
Rp 988.868.000*

B.6 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp988.868.000 dan Rp988.868.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2024 mengalami Kenaikan sebesar 100 persen dibandingkan pada 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan tidak adanya pagu anggaran untuk belanja modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.065.176.240	988.868.000	7,72
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	0,00
Belanja Modal Lainnya	-	-	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	1.065.176.240	988.868.000	7,72
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1.065.176.240	988.868.000	7,72

B.6.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada 31 Desember 2024 adalah sama dengan realisasi pada 31 Desember 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	0,00

B.6.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.065.176.240, mengalami kenaikan sebesar 7,72 persen bila dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp988.868.000. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pagu anggaran untuk belanja modal Peralatan dan Mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
PERALATAN DAN MESIN			
Alat Kantor	42.666.270	78.868.000	(45,90)
Alat Rumah Tangga	322.609.970	0	#DIV/0!
Alat Angkutan Darat Bermotor	642.000.000	910.000.000	(29,45)
Alat Komunikasi	28.800.000	-	(100,00)
Peralatan Komputer	29.100.000	0	100,00
ASET TETAP LAINNYA			
Bahan Perpustakaan Tercetak			
Jumlah Belanja Kotor	1.065.176.240	988.868.000	7,72
Pengembalian			-
Jumlah Belanja	1.065.176.240	988.868.000	7,72

B.6.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara 31 Desember 2024 dan TA 2023 tidak ada belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.6.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara tidak ada Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jembatan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun)
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.6.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Lainnya. Pada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara tidak ada Belanja Modal Lainnya.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TA 2024	TA 2023
Uang Tunai	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp0*

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	TA 2024	TA 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak **C.3 Piutang Bukan Pajak**

Rp0

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang PNPB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNPB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	TA 2024	TA 2023
Piutang Bukan Pajak	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR **C.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

TP/TGR
Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Nama	TA 2024	TA 2023
1		-	-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar TPA **C.5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

TPA
Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA

yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	TA 2024	TA 2023
1		-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih -
Piutang
Lancar
Rp0*

C.6 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	

*Belanja
Dibayar di
Muka
Rp47.304.500*

C.7 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp47.304.500 dan Rp0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau

jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	TA 2024	TA 2023
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Rumah Jabatan Sementara	47.304.500	-
Jumlah	47.304.500	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp25.326.886

C.8 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 25.326.886 dan Rp0.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	TA 2024	TA 2023
Pendapatan yang masih diterima	25.326.886	-
Jumlah	25.326.886	-

Persediaan Rp 26.557.846

C.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp26.557.846 dan Rp37.494.009.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	TA 2024	TA 2023
Barang Konsumsi	26.557.846	37.494.009
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	26.557.846	37.494.009

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0*

C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Debitur	TA 2024	TA 2023
		-	-
		-	-
	Jumlah	-	-

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.11 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap

instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA

No	Debitur	TA 2024	TA 2023
		-	-
		-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0*

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang 31 Desember 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-

Tanah
Rp0

C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2024	0

Peralatan dan
Mesin
Rp
6.851.306.120

C.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp 6.851.306.120 dan Rp 6.037.357.110. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	6.037.357.110
Mutasi tambah:	
Pembelian	1.065.176.240
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	29.750.000
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	(280.977.230)
Saldo per 31 Desember 2024	6.851.306.120
Akumulasi Penyusutan s.d. Desember 2024	(5.019.016.677)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	1.832.289.443

Mutasi transaksi penssambahan peralatan dan mesin Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan
Bangunan
Rp0

C.15 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0 dan Rp0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara tidak mempunyai aset tetap berupa Gedung dan bangunan.

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp0*

C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

*Aset Tetap
Lainnya
Rp27.285.490*

C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp27.285.490 dan Rp27.285.490. Aset tetap tersebut berupa buku perpustakaan.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 pada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara tidak ada Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp(
4.791.067.396)*

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp(5.019.016.677) dan Rp(4.791.067.396). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	6.851.306.120	5.019.016.677	1.832.289.443
2	Gedung dan Bangunan	0	-	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	27.285.490	0	27.285.490
Akumulasi Penyusutan		6.878.591.610	5.019.016.677	1.859.574.933

*Aset Tak
Berwujud Rp0*

C.20 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi

transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
	-
Jumlah	-

Aset Lain-Lain
Rp285.497.230

C.21 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp285.497.230 dan Rp339.620.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	285.497.230
Mutasi tambah:	
- Penghentian Aset Dari Penggunaan	54.122.770
Mutasi kurang:	-
-Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	
- Penghapusan BMN	(339.620.000)
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(285.497.230)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	(285.497.230)

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
(Rp285.497.230)*

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing (Rp285.497.230) dan (Rp339.620.000). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software komputer	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	285.497.230	285.497.230	0
Jumlah	285.497.230	285.497.230	0

*Uang Muka dari
KPPN Rp0*

C.23 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp 1.575.471*

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.575.471 dan Rp1.085.413. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

*Pendapatan
yang
Ditangguhkan
Rp0*

C.25 Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan Ditangguhkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBPN, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 31 Desember 2024.

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian	TA 2024	TA 2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

*Ekuitas
Rp
1.957.188.694*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.957.188.694 dan Rp 1.309.983.800. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP
Rp 574.678.600*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 574.678.600 dan Rp 88.106.802. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN)
Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	0,00
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	-	-	0,00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	574.678.600	88.106.802	552,25
Jumlah	574.678.600	88.106.802	552,25

*Beban Pegawai
Rp0*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	0	0	0,00
Beban Tunjangan - Tunjangan	0	0	0,00
Beban Honorarium dan Varkasi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah Beban Pegawai	0	0	#DIV/0!

*Beban
Persediaan
Rp89.321.231*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp89.321.231 dan Rp55.745.100. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	89.321.231	55.745.100	60,23
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, Leges	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	89.321.231	55.745.100	60,23

*Beban Barang
dan Jasa
Rp976.608.403*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp976.608.403 dan Rp954.300.496. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	#DIV/0!
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	5.661.500	14.821.403	(61,80)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.659.180	4.046.750	(9,58)
Beban Jasa Profesi	7.600.000	6.000.000	26,67
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	55.536.000	90.768.000	(38,82)
Beban Barang Operasional Lainnya	5.760.000	57.661.995	(90,01)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	74.100.000	191.671.000	(61,34)
Beban Bahan	101.150.800	37.585.900	169,12
Beban Sewa	94.609.000	3.600.000	2.528,03
Beban Honor Output Kegiatan	191.125.000	178.273.000	7,21
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID	-	3.476.550	(100,00)
Beban Langganan Telepon	11.988.915	14.489.644	(17,26)
Beban Keperluan Perkantoran	425.418.008	351.906.254	20,89
Jumlah	976.608.403	954.300.496	2,34

*Beban
Pemeliharaan
Rp.
351.783.069*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp351.783.069 dan Rp306.503.742. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	351.783.069	306.503.742	14,77
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	351.783.069	306.503.742	14,77

Beban Perjalanan Dinas **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Rp1.032.019.055

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.032.019.055 dan Rp658.792.075. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	988.849.055	613.202.075	61,26
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	47.370.000	45.590.000	3,90
Jumlah	1.036.219.055	658.792.075	57,29
Pengambalian Beban Perjalanan Dinas	- 4.200.000	-	
Jumlah	1.032.019.055	658.792.075	56,65

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Rp0

Diserahkan kepada Masyarakat

Rp0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan Sosial Rp0 **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp505.207.761 **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp505.207.761 dan Rp361.916.524. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	505.207.761	361.916.524	28,36
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-	#DIV/0!
Jumlah Penyusutan	505.207.761	361.916.524	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	505.207.761	361.916.524	28,36

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar		-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar		-	-
Jumlah	0	-	-

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp162.218.000*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	162.218.000	- 441.751.454	-
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional Lainnya	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	162.218.000	- 441.751.454	- 136,72

Pos Luar Biasa

D.12 Pos Luar Biasa

Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
Jumlah	0	-	-

Pendapatan PNBPN diatas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang mengalami rusak berat karena bencana. Sedangkan Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan merupakan beban-beban yang digunakan secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp1.309.983.800

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.309.983.800 dan Rp861.912.299.

Defisit LO
Rp(2.218.042.919)

E.2 Surplus / (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 2.218.042.919 dan Rp2.690.902.589. Defisit LO merupakan selisih kurang antara defisit kegiatan operasional, surplus kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian
Nilai Aset Rp0

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset mencerminkan penyesuaian atas nilai persediaan yang diakibatkan karena adanya penyesuaian dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode berjalan. Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Penyesuaian	Koreksi
Penyesuaian Nilai Persediaan	-
Jumlah	-

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas nilai persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Nilai Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Selisih

Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih kurang atau selisih lebih antara hasil penilaian dalam rangka Revaluasi Aset Tetap dengan nilai buku sebelum revaluasi yang terjadi pada periode berjalan. Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian per 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset tetap

Jenis Revaluasi	Jumlah Koreksi
Nilai Buku Sebelum Revaluasi	
Nilai Hasil Revaluasi	
Selisih Revaluasi Aset tetap	-

Koreksi Nilai Aset tetap Non Revaluasi Rp0

E.6 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi atas Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan (Rp0). Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Jenis Koreksi	Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Lain-lain	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-lain Rp0

E.7 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi yang dilakukan terhadap ekuitas transaksi lainnya. Koreksi Lain-lain per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Lain-lain per 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Koreksi	Koreksi
Koreksi Lain-lain	-
Ekuitas Transaksi lainnya	-
Jumlah	-

Ekuitas Akhir

Rp 1.957.188.694

E.8 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.957.188.694 dan Rp1.309.983.800.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara Nomor: KEP-19/WKN.14/2024 Tentang Perubahan Pertama atas Surat Keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor : KEP-04/WKN.14/2024 Tentang Penetapan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran dan Staf

Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara, oleh karena itu maka Pejabat Pengelola Keuangan pada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara pada tanggal ditetapkan Surat Keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Sudarsono
Pejabat Pembuat Komitmen	: Andi Hakim Ahmad
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Ni Made Widnyani
Bendahara	: Nabila
Staf PPK	: Slamet Adi Priyatna

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Rincian Akumulasi Penyusutan
- Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran 3 : Neraca
- Lampiran 4 : Laporan Operasional
- Lampiran 5 : Laporan Perubahan Ekuitas
- Lampiran 6 : Neraca Percobaan
- Lampiran 7 : Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pengembalian Belanja
- Lampiran 8 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan
- Lampiran 9 : Laporan Posisi BMN di Neraca
- Lampiran 10 : Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP)
- LBKP Intrakomptabel
 - LBKP Ekstrakomptabel
 - LBKP Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel
 - LBKP Aset Tak Berwujud
 - LBKP Barang Bersejarah
 - LBKP Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Lampiran 11 : Laporan Persediaan
- Lampiran 12 : Daftar Rekening
- Lampiran 13 : Lampiran Lainnya
- LPJ Bendahara Pengeluaran
 - Berita Acara Rekonsiliasi